

# PENDIDIKAN POLITIK ISLAM PERSPEKTIF IMAM AL MAWARDI

**Rini Kusmayani, Abbas Mansur Tamam**  
Sekolah Pasca Sarjana Ibnu Khaldun Bogor  
r.kusmayani@gmail.com

## ABSTRAK

Kegemilangan peradaban Islam telah mewariskan karya-karya besar yang hingga hari ini tetap lestari dijadikan sumber referensi di dalam berbagai bidang kehidupan terkhusus dalam bidang pendidikan. Al-Mawardi adalah seorang Imam yang 'alim dan faqih dalam madzhab Syafi'i, beliau hidup pada masa keemasan dari peradaban Islam yaitu pada masa Dinasti Abbasiyah. Karya-karya fenomenalnya meliputi berbagai disiplin ilmu, dan yang paling menonjol adalah di bidang politik bidang yang selaras dengan kedudukannya yaitu sebagai hakim. Karena selain sebagai ulama yang produktif al Mawardi adalah seorang hakim agung (*Qādhi al-Qudhat*) bahkan gelar ini disandangnya sampai ia wafat. Konsep politik dan konsep pendidikan yang digagasnya perlu digali untuk menyelesaikan krisis politik yang dialami kaum muslimin hari ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur dengan sumber utama yaitu kitab *al ahkam as sulthaniyyah* dan bab *ad dunya* dari kitab *adab ad dunya wa ad din*. Penggalan konsep politik Al-Mawardi telah banyak dilakukan, namun jarang ditemukan bagaimana mengaplikasikannya dalam bentuk pendidikan politik yaitu kurikulum pendidikan politik Islam.

**Kata kunci:** Al-Mawardi, pendidikan Islam, konsep, politik

## PENDAHULUAN

Politik atau *as-siyâsah* tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam dan memegang peranan penting di dalam keberlangsungan tegaknya agama Allah di atas muka bumi. Islam merupakan agama yang *syamil* (integral dan holistik) dan *kamil* (sempurna). Hal tersebut dapat kita temukan dalam implementasi dan cakupannya terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari yang sifatnya perorangan maupun kolektif, dari hal yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Imam Al Ghozali (2012) mengatakan: "Dunia adalah ladang akhirat, agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah dua saudara kembar, agama adalah pondasi (*ushul*) dan kekuasaan adalah penjaganya (*hâris*). Sesuatu tanpa pondasi akan runtuh dan sesuatu tanpa penjaga pasti akan hilang."(p.38).

Pemisahan agama dengan politik yang dipelopori Barat telah diadopsi oleh negara-negara Muslim. Atas nama modernitas dan keterpesonaan dengan kemajuan Barat dalam

sains dan teknologi banyak kaum muslimin juga mengadopsi cara-cara Barat dalam berfikir, menilai dan meyakini sesuatu. Sekularisasi menurut Cornelis van Peursen yang dikutip oleh Syed Naquib al-Attas (2010) didefinisikan sebagai pembebasan manusia dari kungkungan agama dan dari kungkungan metafisik yang mengatur akal dan bahasanya. Bagian-bagian utama dari dimensi sekularisasi adalah penghilangan pesona dari alam tabi'i (*disenchantment of nature*), peniadaan kesucian dan kewibawaan agama dari politik (*desacralization of politics*) dan penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai agama dari kehidupan (*deconsecration of values*).

Syed Naquieb al-Attas menganalisa sebagaimana yang dikutip oleh Wan Mohd Nor Wan Daud (1998) mengenai problem pendidikan saat ini yang berakar pada problem eksternal dan internal. Penyebab eksternal yaitu karena tantangan religius-kultural dan sosial-politik dari kebudayaan Barat sedang internal nampak dalam tiga bentuk fenomena yang saling berhubungan yaitu kebingungan dan kekeliruan dalam memahami ilmu dan aplikasinya, ketiadaan adab (*loss of adab*) dan munculnya pemimpin-pemimpin yang bukan saja tidak layak memimpin umat melainkan juga tidak memiliki akhlak yang luhur dan kapasitas intelektual dan spiritual yang mencukupi yang dibutuhkan dalam kepemimpinan Islam (p.198).

Krisis kepemimpinan Muslim hari ini merupakan salah satu yang menunjukkan betapa urgen pendidikan politik Islam. Stigma negatif terhadap kecakapan dan integritas pemimpin Muslim banyak diangkat ketika ada pemilihan baik kepala daerah maupun presiden. Selain itu merebaknya paham sekuler dikalangan umat Islam telah menimbulkan *islam phobia*, agama dan politik seolah-oleh dua hal yang harus dipisahkan, tidak dapat seiring sejalan. Bahkan dalam (Kompas, 2017) diyakini jika menggabungkan politik dengan agama akan mengakibatkan kemunduran, konflik dan perpecahan sehingga keduanya harus dipisah betul.

Merujuk pada permasalahan-permasalahan di atas maka diperlukan upaya adanya pengembangan kurikulum pendidikan Islam yaitu dengan adanya kurikulum pendidikan politik Islam, sebagaimana Imam al-Ghazali pun mengusulkan pelajaran politik sebagai salah satu pelajaran

untuk diajarkan di sekolah. Maka pemikiran al Mawardi dalam bidang politik perlu digali terkhusus dalam konsep pendidikannya yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini.

Al Mawardi adalah seorang Imam yang 'alim dan faqih dalam madzhab Syafi'i, beliau hidup pada masa keemasan dari peradaban Islam yaitu pada masa Dinasti Abbasiyah.

Karya-karya fenomenalnya meliputi berbagai disiplin ilmu, dan yang paling menonjol adalah karyanya di bidang politik, bidang yang selaras dengan kedudukannya yaitu sebagai hakim. Karena selain sebagai ulama yang produktif al Mawardi adalah seorang hakim agung (*qadhi al qudhat*) bahkan gelar ini disandanginya sampai ia wafat. Karya-karyanya dalam bidang politik yang sangat fenomenal adalah *al-Ahkamu as-sulthaniyyah*.

Salah satu karya Imam al-Mawardi yang merupakan karyanya dalam bidang pendidikan adalah kitab *Adabu ad-Dunya wa ad-Din*. Sebagai seorang faqih dan praktisi dalam bidang politik kitab pendidikannya ini juga sarat dengan pemikirannya dalam bidang politik. Imam al Mawardi mengungkapkan dalam mukadimah kitab *Adabu ad-Dunya wa ad-Din* (1405H): “Dan perkara yang terbesar, bernilai, terpenting dan memberikan manfaat adalah apa-apa yang menopang tegaknya agama dan dunia. Dengannya kemaslahatan dunia dan akhirat bisa berjalan dengan baik. Karena bila agama tegak, maka ibadah akan berjalan dengan baik dan benar, dan dengan kebaikan dunia akan terwujud kebahagiaan yang sempurna” (p. 5).

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pendidikan politik Islam menurut al Mawardi?
2. Bagaimana implementasi pendidikan politik Islam perspektif al Mawardi dalam materi (program) kurikulum pendidikan Islam?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pembahasan penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menjelaskan konsep pendidikan politik Islam perpektif al-Mawardi dengan menjadikan kajian politik dalam kitab *adabu ad dunya wa ad din* pada bab *adab dunya* dan kitab *al-ahkam al-shulthaniyyah* sebagai sumber primer. Selain itu penulis juga merujuk kepada sumber-sumber sekunder sebagai literatur yang relevan untuk memperkuat analisis ini.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Pengertian politik Islam**

Dalam bahasa Arab istilah politik dikenal dengan *as-siyâsah*. *As-siyâsah* merupakan masdar dari kata *sâsa - yususu*. Dalam (Al-Bishri, 1999, p. 351) pengertian harfiah *as-siyâsah* diantaranya adalah melatih, administrasi, management, pemimpin, memperindah, politik.

Dalam *Lisan al Arab*, *as-siyâsah* memiliki arti *as-qiyâmu a'la syai biyushlihu* yaitu menegakkan atas sesuatu dengan memperbaikinya. Berasal dari kosa kata *sawasa-yasûsu* artinya kepemimpinan. Pelakunya disebut *sâ'is* (Manzur, p. 2149).

Abdul Hamid al-Ghazali (2001) mengatakan bahwa *as-siyâsah* memiliki beberapa arti dan cakupan makna yang dibatasi dalam tiga pengertian yaitu: (1) *as siyâsah* adalah wilayah urusan rakyat dan penanganannya berupa perintah dan larangan, baik yang dikeluarkan dari seorang imam (kepala negara) maupun dari bawahannya seperti gubernur, menteri, hakim, dan lain-lain; (2) *as siyâsah* adalah tata aturan hukum kepemimpinan negara atau kekhalifahan umum dari sisi kecakapan penguasa, kewajiban-kewajibannya, kewajiban-kewajiban rakyat terhadapnya, kewenangan hukum yang diberikan, oleh Allah yang Maha Pembuat aturan kepada penguasa untuk menjamin pengayoman bagi para bawahannya; (3) *as siyâsah* adalah hukuman pidana yang sesuai syari'ah (p. 151).

Beberapa pengertian politik Islam secara komprehensif dan dipandang memenuhi persyaratan teks akademis politik secara umum seperti pendapat Ibnu Aqil, Ibn 'Abid al-Din yang dikutip oleh Djazuli, sebagai berikut: "*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya. Menurut Ali Syariati, politik Islam selain menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), juga dalam waktu yang sama dapat menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya politik (*politique*) dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan. Dalam arti kata, cakupan politik Islam memiliki dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (kemanusiaan), baik dalam aspek yuridis legislasi maupun praksis pemerintahan. Pertanggungjawaban-pun berbeda dengan ideologi politik profan. Cakupan politik Islam memiliki dua sisi pertanggung jawaban, yakni berdimensi hukum Tuhan dan kemasyarakatan (p. 151).

Politik Islam juga sering diistilahkan dengan *as-siyâsah as-syar'iyah*. Secara umum *as-siyâsah as-syar'iyah* diartikan sebagai sinonim dengan tata aturan kekuasaan. Sedangkan secara khusus diartikan sebagai pembahasan tentang segala hal yang keluar dari pemegang kekuasaan (*ulil amri*) berupa aturan hukum dan kebijakan-kebijakan yang berpijak pada kemaslahatan dalam masalah yang di dalamnya tidak terdapat dalil khusus dan spesifik tanpa menyalahi syariah. Menurut Ibnu Qayyim yang dimaksud dengan "*ulil amri*" yaitu para ulama dan para penguasa politik. Sehingga *as-siyâsah as-syar'iyah* tidak hanya terbatas pada apa-apa yang keluar dari penguasa politik semata namun juga berupa fatwa para mufti yang bukan pemegang jabatan dan kekuasaan pemerintahan.

Kajian terhadap *as-siyâsah as-syar'iyah* meliputi tiga aspek utama yaitu: (1) *Dusturiyah* (tata negara) meliputi aturan pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahann serta aturan yang berkaitan dengan hak pribadi, masyarakat dan negara; (2) *Kharijiyyah* (luar negeri) meliputi hubungan antar negara, kaidah yang melandasi hubungan ini dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai; (3) *Maaliyah* (harta), meliputi sumber keuangan dan belanja negara. Dalam *as-siyâsah as-syar'iyah* dikenal tiga lembaga kekuasaan yaitu *as-sultah at-tasyri'iyah* (pembuat undang-undang/legislatif), *as-sultah at-tanfiziyyah* (pemerintahan/eksekutif) dan *as-sultan al-qadâiyyah* (kekuasaan kehakiman/yudikatif). Menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sebagai tokoh pembaharu di Mesir lembaga legislatif harus melibatkan banyak pihak seperti ekonom, pengusaha, militer, cendikiawan, untuk memikirkan kebijaksanaan yang akan diambil dan dijalankan penguasa karena urusan negara mencakup seluruh persoalan umat (Suplemen Ensiklopedia Islam, p. 176). Jadi inti dari *as-siyâsah as-syar'iyah* adalah mengatur kepentingan umum untuk kemaslahatan umat dengan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam walaupun ia tidak ada dalam wahtyu dan hadis yang mengatur tentangnya.

## **2. Konsep Pendidikan Politik Islam menurut al Mawardi**

### **Tujuan Pendidikan Politik Islam**

Berdasarkan kedua kitab yang dijadikan referensi primer dalam penelitian ini, maka secara garis besar tujuan pendidikan politik menurut al Mawardi yang pertama adalah pencapaian pada aspek kognitif berupa pengetahuan tentang hukum-hukum seputar pemerintahan yang wajib diketahui oleh seorang pemimpin. Pengetahuan ini suatu hal yang penting agar lahir pemimpin-pemimpin yang memahami tentang arahan agama mengenai hak yang dimilikinya dan kewajiban yang dipikulnya. Tujuan yang kedua adalah pencapaian aspek afektif dan psikomotorik yaitu mewujudkan kebaikan dalam kehidupan dunia dengan terciptanya keberaturan dalam segala urusan dan tercapainya kebaikan perilaku dan keadaan manusia sebagai penghuninya.

Kemudian bagaimana untuk dapat menjaga dan memperbaiki keadaan dunia sehingga keadaannya teratur dan urusan dapat berjalan dengan baik al Mawardi menuturkannya dalam enam prinsip, yaitu

- (1) Menjaga dan menegakkan agama,
- (2) Membangun pemerintahan yang kuat,

- (3) Menjamin keadilan bagi seluruh penduduknya,
- (4) Terciptanya rasa aman dan tentram.
- (5) Menciptakan kemakmuran ekonomi penduduknya.
- (6) Membangun cita-cita yang tinggi untuk memakmurkan bumi dan meraih kesejahteraan hidup

Sedangkan untuk memperbaiki perilaku manusia (*sholah hâl al insân*) diuraikan dalam tiga prinsip yaitu:

- (1) Memiliki jiwa yang taat kepada kebenaran dan menolak penyimpangan
- (2) Memiliki kasih sayang yang mengokohkan persatuan
- (3) Materi yang cukup memadai.

### **Kurikulum Pendidikan Politik Islam**

Kurikulum pendidikan politik perspektif al-Mawardi penulis susun berdasarkan kesembilan prinsip *sholah ad-dunya* yang menghasilkan lima kurikulum pendidikan politik:

#### 1. Pendidikan agama

Al-Mawardi mengatakan bahwa segala urusan tidak akan pernah tercapai jika tanpa agama dan manusia tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali mengikutinya. Karena agama merupakan prinsip yang paling kokoh dalam memperbaiki dan menegakkan kehidupan dunia dan juga sebagai ketentuan yang bermanfaat bagi keberaturan dan keselamatan dunia. Agama merupakan faktor yang paling dominan untuk memperbaiki dunia dan satu-satunya keyakinan untuk menghantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Al Mawardi mengutamakan ke-*faqih*-an seorang pemimpin dalam agama. Karena seorang pemimpin diharapkan mampu berjihad dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ia membagi ilmu-ilmu hukum syariah menjadi empat yaitu: pengetahuannya tentang Kitabullah dengan benar, pengetahuannya tentang sunnah Rasulullah SAW, *ijma'* *salafush shalih*, dan *qiyas* (1405H, p. 103-104). Secara umum kurikulum pendidikan agama dapat dirumuskan terdiri dari al-Qur'an, hadis, fiqh dan ushul fiqh, sejarah, bahasa Arab, dan pemahaman Islamic Worldview.

#### 2. Pendidikan *tadzkiyatun nafs* (pensucian jiwa)

*Tadzkiyatun nafs* merupakan pendidikan bagi jiwa, hal ini didasarkan kepada prinsip yang pertama dari prinsip-prinsip untuk dapat memperbaiki perilaku dan keadaan manusia. Menurut al-Mawardi dalam memperbaiki perilaku manusia yaitu terbentuknya jiwa yang taat kepada kebenaran dan menolak penyimpangan. Al Mawardi mengatakan bahwa jiwa yang taat maka ia akan dapat dikuasai dan dikendalikan dan sebaliknya jiwa yang tidak taat maka

ia tidak dapat dikuasai dan dikendalikan. Barangsiapa yang tidak dapat mengendalikan jiwanya maka ia tidak akan mampu mengendalikan yang lainnya.

Ketaatan jiwa dapat dibentuk karena dua hal yaitu nasehat dan ketundukan (*al-inqiyad*). Yang dimaksud dengan nasehat yaitu melihat segala persoalan sesuai dengan hakikatnya sehingga dapat melihat kebenaran sebagai suatu kebenaran yang baik baginya dan melihat kesesatan sebagai suatu kesesatan yang buruk baginya. Hal ini akan dibenarkan oleh jiwa ketika terbebas dari bujukan hawa nafsu. Berkenaan dengan hal ini, dikatakan: “Barangsiapa berfikir maka ia akan dapat melihat.” Sedangkan yang dimaksud dengan ketundukan (*al-inqiyad*) yaitu bersegera mengikuti kebenaran ketika diperintahkan dan mencegah kesesatan ketika dilarang. Adapun adab bagi jiwa adalah menyempurnakan ketaatan dan melahirkan kebaikan (p.161).

### 3. Pendidikan kepemimpinan

Al-Mawardi menuliskan bahwa seorang pemimpin dengan kewibawaannya dapat mempersatukan hati-hati yang bertentangan, dengan kekuasaannya dapat mencegah kedzaliman. Penguasa merupakan faktor utama dalam mencegah kedzaliman, sebab akal dan agama seringkali lemah dan dapat dikalahkan oleh hawa nafsu.

Kurikulum pendidikan kepemimpinan ini didasarkan kepada prinsip yang kedua, ketiga dan keempat dari prinsip-prinsip bagaimana menciptakan keteraturan dalam kehidupan. Urgensi pendidikan kepemimpinan dalam Islam, diterangkan oleh al-Mawardi, bahwasannya kepemimpinan adalah pondasi yang mengokohkan prinsip-prinsip agama dan mengatur kepentingan-kepentingan umum hingga urusan rakyat berjalan dengan normal. Jika merujuk ke salah satu tujuan pendidikan politik yang sudah dijelaskan di atas maka pendidikan kepemimpinan ini meliputi aspek kognitif berupa pengetahuan tentang tugas-tugasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemimpin, tentang halal dan haram yang diarahkan oleh agama.

Pendidikan kepemimpinan juga harus menyentuh aspek afektif dan psikomotorik yaitu tentang bagaimana akhlak-akhlak dan sikap seorang pemimpin. Adapun akhlak yang paling utama yang harus dimilikinya adalah amanah dan adil. Amanah dan adil merupakan timbangan yang telah ditekankan di dalam al Qur'an surat an-Nisa ayat 58:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil”.*

Dalam menjegakkan keadilan, al-Mawardi membaginya menjadi dua yaitu adil terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Adapun menegakkan keadilan pada diri sendiri

yaitu bahwa ia harus membawa dirinya pada kemaslahatan dan menahan dirinya dari hal-hal yang menimbulkan keburukan. Kemudian menetapkan dirinya pada keadaan pertengahan di antara dua sikap yaitu sikap berlebihan atau melampaui batas dan sikap serba kekurangan. Karena sikap ini dapat menimbulkan penindasan dan kezaliman. Orang yang berbuat zalim terhadap diri sendiri maka akan lebih zalim terhadap orang lain. Dan orang yang tidak dapat berbuat adil kepada diri sendiri akan lebih tidak adil lagi kepada orang lain (p. 154).

Sedangkan menegakkan keadilan terhadap orang lain, al Mawardi membagi menjadi tiga keadaan. Pertama, keadilan seseorang terhadap orang yang kedudukannya ada di bawahnya seperti seorang penguasa terhadap rakyatnya dan seorang pemimpin atas bawahannya. Keadilan yang ditegakkan atasnya dapat dilihat dari empat faktor yaitu memberikan kemudahan, menghilangkan kesulitan, meninggalkan kesewenang-wenangan dan mencari kebenaran dalam setiap prilakunya. Kedua, keadilan seseorang pada orang yang kedudukannya berada di atasnya seperti keadilan rakyat terhadap penguasanya dan bawahan terhadap atasannya. Dalam hal ini dapat dilihat dari tiga keadaan yaitu keikhlasan dalam melakukan ketaatan, kerelaan dalam memberikan pertolongan untuk menghilangkan kelemahannya dan kejujuran dalam memberikan loyalitasnya. Ketiga, keadilan yang ditegakkan seseorang terhadap orang yang kedudukannya setara. Hal ini dapat dilihat dalam tiga keadaan yaitu meninggalkan sikap sombong, menjauhi sikap hina, dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang menyakitkan (p. 155-156).

Secara umum al-Mawardi menuliskan bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin umat ada tujuh yaitu: menjaga agama dari penyimpangan dan memerintahkan umat untuk menjalankannya dan tidak melalaikannya; menjaga ketentraman umat dari musuh yang akan membahayakan agama, jiwa dan harta; membangun negeri berdasarkan pada segala kemaslahatannya dan memperbaiki sarana dan prasarannya; menentukan pendaanaan dengan berdasarkan kepada ketentuan agama tanpa penyimpangan baik dalam penerimaan maupun pengeluaran; memberantas ketidakadilan dan menegakkan hukum dengan menyelesaikan perselisihan di antara warganya berdasarkan kesamaan kedudukan di dalam hukum; menegakkan *hudûd* (hukuman) atas orang yang berhak menerimanya tanpa menambah dan menguranginya, dan memilih wakil-wakilnya dalam berbagai urusan dengan memperhatikan kapasitas dan sifat amanah. Al Mawardi mengatakan jika seorang pemimpin umat mampu melaksanakan ketujuh hal di atas maka hak-hak Allah SWT dapat ditegakkan di antara umatnya dan umat akan taat dan saling menasehati (p. 151).

Dalam pembahasan tentang konsep kepemimpinan, al Mawardi (2014) tidak hanya membahas tentang Imam (khalifah) dalam hal ini *khalifah al-uzhma*, namun juga perangkat-

perangkat kelengkapan lainnya seperti menteri, gubernur, panglima jihad, hakim, wali pidana, naqib hingga ke imam sholat, amirul haj dan petugas sedekah.

#### 4. Pendidikan sosial kemasyarakatan (*tarbiyah ijtima'iyah*)

Pendidikan sosial kemasyarakatan didasarkan pada prinsip kedua dari prinsip-prinsip untuk memperbaiki perilaku dan keadaan manusia. Al Mawardi mengatakan bahwa perasaan saling mengasihi dan keinginan untuk menjalin persatuan dan persahabatan dapat menumbuhkan sikap saling tolong menolong, mencegah iri hati dan kezaliman sehingga tercipta kehidupan yang nikmat dan lebih baik. Persatuan bisa menyatukan perpecahan dan mencegah kehinaan. Menurutnya ada lima hal yang mendorong terciptanya persatuan yaitu agama (*ad-dîn*), keturunan (*nasab*), perkawinan (*mashâhirah*), cinta kasih atau persahabatan (*al-mawaddah*) dan kebajikan (*al-birr*) (1045H, p. 162).

Tingkatan persaudaraan menurut al Mawardi yaitu kesamaan yang melahirkan kesepakatan, saling menyukai dan menyenangkan, kesetiaan yang disebabkan adanya niat yang tulus (*ikhlas*), kasih sayang (*al mawaddah*), adanya saling percaya (*tsiqah*), dan ini adalah tingkatan yang menjadi pangkal kesempurnaan dalam persaudaraan dimana tingkatan-tingkatan sebelumnya berpusat padanya. Maka jika hal ini digabungkan dengan saling tolong menolong, akan melahirkan perasaan cinta (*al mahabbah*), keagungan, dan gairah atau kerinduan yang disebabkan adanya keinginan yang besar (p. 177).

Dalam pendidikan ijtima'iyah seorang anak didik hendaklah memiliki pemahaman tentang etika bersosialisasi bagaimana membangun suatu hubungan yang baik dan dapat menyampaikan pada persatuan yang kokoh. Contoh sederhana adalah bagaimana memilih pertemanan yang dapat mengantarkannya pada keutamaan dan kebaikan, dan juga mampu menunaikan hak-hak dalam suatu jalinan pertemanan.

#### 5. Pendidikan finansial (*tarbiyah iqtishadiyyah*)

Pendidikan finansial ini merupakan integrasi dari prinsip kelima dan keenam dari prinsip-prinsip untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan dan prinsip kedua dari prinsip-prinsip untuk memperbaiki perilaku dan keadaan manusia. Pendidikan finansial ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan sumber-sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan rakyat. Harta negara harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya secara efektif dan efisien.

Pendidikan finansial meliputi aspek kongitif yang meliputi pengetahuan sumber-sumber keuangan dan bagaimana mengelolanya. Contohnya adalah pengelolaan pajak (*kharaj*), pengelolaan *baitul mâl*, dan lain-lain.

Al Mawardi mengatakan bahwa materi (harta) merupakan sebuah hajat atau kebutuhan manusia yang tidak ada seorang pun bisa terlepas darinya. Menurut al Mawardi, materi merupakan suatu hal yang jika ia tidak ada maka tidak akan dapat berlangsung kehidupan dan tidak akan tegak agama. Allah telah menjadikan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia dan menjangkau manfaat dalam dua hal yaitu materi (*al madah*) dan usaha (*al kasab*). Adapun yang dimaksud dengan materi adalah sesuatu yang diperoleh dari sumber yang dapat tumbuh dan berkembang yang terdiri dari tumbuhan yang subur (bidang pertanian) dan hewan yang berkembang biak (bidang peternakan). Sedangkan yang dimaksud dengan usaha adalah pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghantarkan dalam memperoleh materi dan mengarahkan pada pencapaian kebutuhan. Usaha terbagi menjadi dua yaitu melalui pertukaran dalam bidang perdagangan dan bidang industri.

Dalam aspek apektif, al-Mawardi juga memberikan perhatian bagaimana seorang anak didik diharapkan memiliki sikap yang tepat terhadap materi. Sikap-sikap tersebut yaitu dijelaskan oleh al Mawardi yaitu, dermawan, zuhud, *iffah* atau menjaga diri dari memintaminta, tidak *ishraf* dan *tabdzir*, *qanaah*, ikhlas, dll sehingga seorang anak didik dapat memiliki sikap yang tepat terhadap harta. Dalam aspek psikomotorik bagaimana membangun keterampilan dalam berusaha meraih penghidupan. Salah satu contohnya adalah pendidikan kewirausahaan atau *life skill*.

## **PEMBAHASAN**

Jika melihat kepada lima kurikulum di atas, yang dihasilkan dari sembilan prinsip-prinsip al-Mawardi untuk dapat memperbaiki keadaan dunia, maka kurikulum pendidikan politik Islam perspektif al-Mawardi ini lebih tepat diterapkan untuk anak didik usia *taktif* atau telah mencapai baligh yaitu pendidikan menengah. Namun dapat juga mulai diterapkan dari pendidikan dasar dengan memilih kurikulum yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak didik. Diberikan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga pemahaman anak akan semakin kokoh dan integral dan dapat mencapai kematangan dan kesiapan memikul *taklif* dengan lebih baik.

Pengembangan kurikulum dari pemikiran al Mawardi ini juga harus disesuaikan dengan kondisi politik di Indonesia sehingga dapat menjawab kebutuhan tantangan yang ada. Konsep-konsep yang diaplikasikan adalah konsep-konsep umum sedangkan untuk konsep-konsep yang tidak kontekstual dengan kebutuhan saat ini mendapatkan porsi hanya pada aspek kognitif level C1 yaitu sebagai pengetahuan atau wawasan, sebagai contoh

permasalahan *ghanimah*, *fa'i*, konsep *imamah al udzma* dimana al-Mawardi mengharuskan seorang khalifah berasal dari suku Quraisy.

## KESIMPULAN

Tujuan pendidikan politik al-Mawardi yang utama adalah mewujudkan kebaikan dunia (*sholah ad-dunya*), di mana kebaikan dunia dapat dilihat dari dua sisi yaitu keberaturan dalam segala urusan dan kebaikan keadaan dan perilaku manusia. Bagaimana untuk menciptakan keteraturan dalam berbagai urusan, al-Mawardi mengungkapkan dalam enam prinsip yaitu menjaga dan menegakkan agama, membangun pemerintahan yang kuat, menjamin keadilan bagi seluruh penduduknya, terciptanya rasa aman dan tentram, menciptakan kemakmuran ekonomi penduduknya dan membangun cita-cita yang tinggi untuk memakmurkan bumi dan meraih kesejahteraan hidup. Sedangkan untuk memperbaiki perilaku manusia (*sholah hâl al insân*) diuraikan dalam tiga prinsip yaitu memiliki jiwa yang taat kepada kebenaran dan menolak penyimpangan, memiliki kasih sayang yang mengokohkan persatuan, materi (harta) yang cukup memadai.

Kurikulum pendidikan politik al-Mawardi yang penulis turunkan dari kesembilan prinsip tersebut yaitu pendidikan agama, pendidikan *tadzkiyatun nafs*, pendidikan kepemimpinan, pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan finansial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed M. Naquib. (2010). *Islam dan Sekularisme*, Bandung: PIMPIN.
- Bisri, al-, Munawwir. (1999). *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. (2003). *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. N. Al Attas*, Bandung: Mizan.
- Ghazali, Abdul Hamid al-. (2001). *Pilar-pilar kebangkitan Umat*, Jakarta: al-I'tishom.
- Ghazali, al-, 2013, *Ihya Ulumuddin (Jilid I)*, Kairo: al-Quds.
- Mawardi, al-. (1405H). *Adabu al Dunya wa al Din (Syarh wa Ta'liq Muhammad Karim Raajih)*.
- Mawardi, al-.(2014). *al Ahkam as-sulthaniyyah*, Kairo: al-Quds.
- Mufid, Nur., Fuad, Nur. (2000). *Bedah al Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep kelembagaan Politik Era Abasiyah*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al Arab.pdf*.
- Suplemen Ensiklopedia Islam Vol. 2. Jakarta: Ihtian Baru Van Hoes.
- Tafsir, Ahmad. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Rosda.

Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (2014). *Politik Islam*, Jakarta: Griya Ilmu.

Webster Third New International Dictionary vol 2. USA: Encyclopedia Britannica.

[http://nasional.kompas.com/read/2017/03/24/19084521/presiden.jokowi.pisahkan.agama.dan.](http://nasional.kompas.com/read/2017/03/24/19084521/presiden.jokowi.pisahkan.agama.dan.politik)

[politik](#)(diakses 02 Mei 2017)